

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

Kota Semarang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, industri, dan pendidikan. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki *stereotype* sebagai kota metropolitan di Indonesia. Dengan perkembangan yang pesat di berbagai sektor, Semarang terus berkembang sebagai kota yang modern namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan sejarahnya. Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,78 km² dan terbagi menjadi 16 kecamatan serta 177 kelurahan. Kota ini memiliki topografi yang unik dengan wilayah dataran rendah di utara dan perbukitan di selatan, sehingga memberikan karakter geografis yang beragam.

Kota Semarang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-16. Kota ini didirikan oleh Ki Ageng Pandanaran, yang diangkat sebagai bupati pertama oleh Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang pada tahun 1547. Pada masa kolonial Belanda, Semarang berkembang menjadi pusat perdagangan dan administrasi penting di Pulau Jawa. Pada abad ke-19 dan ke-20, pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan perkantoran, semakin memajukan Semarang. Hingga kini, jejak sejarah masih terlihat melalui berbagai bangunan kolonial di kawasan Kota Lama Semarang yang menjadi daya tarik wisata sejarah.

Kota Semarang menampung populasi sekitar 1,7 juta jiwa dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi. Semarang merupakan entitas urban multietnik yang mencakup beragam kelompok etnis, antara lain Jawa, Tionghoa, Arab, dan lainnya. Heterogenitas tersebut melahirkan interaksi sosial yang dinamis sekaligus menjadikan kota ini sebagai ruang yang inklusif serta menjunjung tinggi toleransi antarbudaya. Ragam bahasa yang dominan dipergunakan oleh mayoritas penduduk adalah Bahasa Jawa dengan dialek khas Semarang, sementara Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingua franca dalam aktivitas komunikasi sehari-hari.

Menjadi pusat ekonomi utama di Jawa Tengah, terhitung beberapa sektor unggulan yang menjadi penggerak ekonomi kota ini antara lain Industri, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, dan Transportasi. Semarang dikenal sebagai pusat pendidikan di Jawa Tengah dengan berbagai perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Katolik Soegijapranata. Selain itu, kota ini memiliki berbagai sekolah unggulan yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini. Dari sisi budaya, Semarang merupakan kota yang memiliki keberagaman budaya yang tercermin dalam berbagai festival, tradisi, dan kuliner. Salah satu tradisi khas adalah Dugderan, sebuah festival tahunan yang menandai awal bulan Ramadhan. Kuliner khas Semarang, seperti lumpia, tahu gimbal, dan bandeng presto, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, Pemerintah Kota Semarang menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, efisien, dan berbasis pada nilai-nilai inti sebagai alat untuk menyampaikan sistem kebijakan kepada warga. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan aparatur yang termasuk ke dalam Pemerintah Kota Semarang dapat bekerja dengan lebih disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugasnya.

2.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan lembaga yang bertugas mengontrol dan bertanggung jawab menyajikan layanan optimal pada warga terkait penanggulangan bencana. Tujuan utama BPBD adalah untuk mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik dalam bentuk kerusakan fisik terhadap bangunan dan infrastruktur, korban jiwa, maupun dampak psikologis yang dialami masyarakat akibat bencana yang terjadi di Kota Semarang.

BPBD berlokasi di Kompleks Terminal Penggaron, Jl. Brigjen Sudiarto No.KM. 11, Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50194. Lokasi BPBD Kota Semarang terletak cukup jauh dari pusat kota karena instansi ini memiliki banyak kendaraan operasional untuk

keperluan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan area bangunan yang luas guna menampung armada serta mendukung kelancaran operasional dalam menghadapi berbagai situasi darurat.



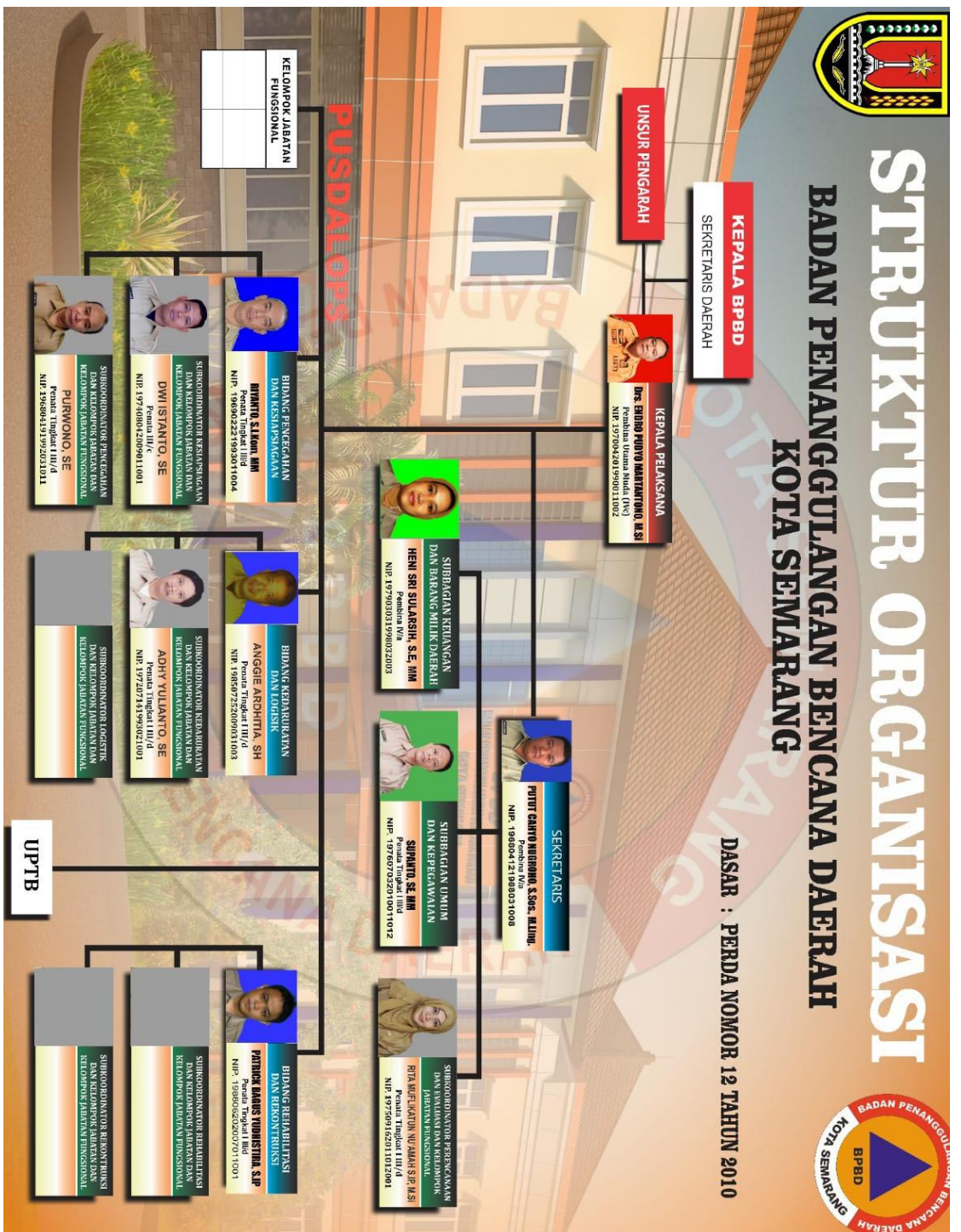
Gambar 2. 1 Logo BPBD Kota Semarang

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2025

Logo BPBD Kota Semarang memaknasi elemen penting, di mana simbol segitiga di tengah lingkaran mencerminkan tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pemerintah (BPBD), sektor swasta atau dunia usaha, serta masyarakat. Penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Sinergi ini sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas dalam menghadapi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

2.2.1 Struktur Badan Kepegawaian BPBD Kota Semarang

BPBD memiliki hierarki untuk memberikan alur dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari organisasi tersebut, sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2025

2.2.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari BPBD Kota Semarang, diantaranya :

- **Visi**

Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.

- **Misi**

Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kota (pengembangan sistem peringatan dini bencana.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang menjelaskan bahwa Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Badan dalam menjalankan mandatnya menyelenggarakan serangkaian fungsi sebagai berikut:

- a. Perancangan kebijakan pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b. Penyusunan rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi Walikota.
- c. Sinkronisasi pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka menjalankan program serta aktivitas pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- d. Penyelenggaraan tata kelola kinerja aparatur Badan.
- e. Formulasi dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan respons yang sigap, akurat, efektif, dan efisien.
- f. Koordinasi pelaksanaan aktivitas penanggulangan bencana secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan.
- h. Implementasi program dan kegiatan pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta UPTB.
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas program serta kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.
- j. Penyusunan laporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan tambahan yang diberikan oleh Walikota sehubungan dengan tugas dan wewenangnya.

2.2.4 Atribut Kelengkapan

Kelengkapan atribut untuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari standar profesionalisme dan identitas sebagai abdi negara. Atribut ini berfungsi untuk menunjukkan identitas kedinasan, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung citra ASN sebagai pelayan publik. Berikut adalah penjelasan mengenai kelengkapan atribut ASN secara umum, khususnya saat menggunakan



Gambar 2. 3 Kelengkapan Atribut

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Kelengkapan atribut pakaian dinas untuk pegawai BPBD Kota Semarang, khususnya pakaian dinas lapangan berwarna oranye, disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta peraturan yang berlaku. Atribut-atribut tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga mendukung aspek

keselamatan, profesionalitas, dan kedisiplinan. Seragam berwarna oranye disebut sebagai PDL (Pakaian Dinas Lapangan) menjadi seragam resmi BPBD yang digunakan untuk kegiatan lapangan. Warna oranye dipilih karena mencolok dan mudah terlihat, sehingga meningkatkan visibilitas saat bertugas di lokasi bencana atau keadaan darurat.